



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 46.e TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2019-2024

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2019, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 perlu di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Maret 2019

Pih. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku di Ambon;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
8. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 46.e TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

- Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Maluku
Sekretaris : Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku
Anggota :
1. Kepala Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku
 3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Maluku
 4. Kabid. Penelitian dan Pembangunan Bappeda Provinsi Maluku
 5. Kabid. Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi Maluku
 6. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku
 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Maluku
 8. Kasubag Keuangan dan Aset Bappeda Provinsi Maluku
 9. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku
 10. Kasubid Data dan Informasi Bappeda Provinsi Maluku
 11. Kasubid Monev dan Pelaporan Bappeda Provinsi Maluku
 12. Kasubid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda Provinsi Maluku
 13. Kasubid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Bappeda Provinsi Maluku
 14. Kasubid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III Bappeda Provinsi Maluku
 15. Kasubid Ekonomi dan SDA I Bappeda Provinsi Maluku
 16. Kasubid Ekonomi dan SDA II Bappeda Provinsi Maluku
 17. Kasubid Ekonomi dan SDA III Bappeda Provinsi Maluku
 18. Kasubid Penelitian Sosial dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Maluku
 19. Kasubid Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas Bappeda Provinsi Maluku
 20. Kasubid Penelitian Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Maluku
 21. Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat I Bappeda Provinsi Maluku
 22. Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat II Bappeda Provinsi Maluku
 23. Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat III Bappeda Provinsi Maluku
 24. Novalius S. Leatemia SP, M.Si
 25. Mochsen Abdullah SE
 26. Syarifah Radinah Alhabsyi S.Pi

Pih. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Esa atas segala rahmatnya sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Maluku tahun 2019 -2024 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Maluku merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah dan program-program strategis selama 5 (lima) tahun. Renstra ini juga memuat permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku yang akan dijabarkan kedalam program dan kegiatan setiap tahun.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Maluku selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Ambon, Januari 2020

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Maluku



[Handwritten Signature]
Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi, M.Si

Pembinan Tk. I
NIP. 19710212 199803 1 012

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	47
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku	51

3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59
3.3.	Telaahan Renstra Bappenas Tahun 2015-2019	62
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Maluku	74
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	75
4.1.	Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku	75
4.2.	Hubungan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku dan Tujuan Sasaran RPJMD	77
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	80
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	90

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1	Jumlah Pegawai Menurut Bidang Tugas dan Gender..... 12
Tabel 2	Pendidikan Pegawai Menurut Gender 15
Tabel 3	Diklat Kepiemimpinan ASN Menurut Gender 15
Tabel 4	Jumlah ASN Bappeda Provinsi Maluku Menurut Kepangkatan/Golongan dan Gender 16
Tabel 5	Sarana dan Prasarana Perkantoran 17
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2014- 2019 20
Tabel 7	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 22
Tabel 8	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014- 2018 47
Tabel 9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 56
Tabel 10	Gugus Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan 67
Tabel 11	Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Maluku Berdasarkan RTRW Nasional 70
Tabel 12	

	Telaahan KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan	72
Tabel 13	Bappeda Provinsi Maluku	
	Tujuan, Sasaran dan Indikator Pelayanan Jangka Menengah	75
Tabel 14	Bappeda Provinsi Maluku	
	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda	76
Tabel 15	Provinsi Maluku	
	Hubungan Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran	77
Tabel 16	Bappeda Provinsi Maluku	
	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda	81
	Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bappeda Provinsi Maluku merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang uraian tugasnya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku.

Untuk itu sebagai Perangkat Daerah, Bappeda harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan bersinergi dengan Renstra Bappenas Republik Indonesia agar tercipta konsistensi perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku tahun 2019-2024, merupakan landasan pijak untuk penyusunan perencanaan di Bappeda selama 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini bertujuan mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam program, kegiatan dan sasaran pembangunan daerah kedepan. Tersusunnya Renstra Bappeda tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman pembangunan dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pusat dan daerah. Selanjutnya Renstra ini, akan menjadi acuan bagi Bappeda Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kerja tahunan (RENJA), dan menjawab indikator-indikator daerah yang hendak dicapai dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dapat dikolaborasi dan sinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan program sektoral di Maluku

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappeda tahun 2019-2024 adalah sebagai dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun yang berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;PP 72 tahun
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
14. Permendagri 90 tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku;
21. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Maluku tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi antara dokumen perencanaan baik pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku adalah:

1. Menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas fungsi Bappeda, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di Provinsi Maluku.
2. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh Pimpinan Organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan dan saran pembangunan daerah.
3. Menggambarkan wujud dan pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan.
4. Sebagai bahan untuk penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah yang juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024
5. Sebagai pedoman untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II . GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra BAPPENAS
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku

5.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku dan Tujuan Sasaran RPJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016, menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;

- e. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Maluku dan uraian tugas jabatan sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan. Sekretaris Badan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Kepala Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

- Sub Bidang I : Monev dan Pelaporan
- Sub Bidang II : Perencanaan Program Daerah
- Sub Bidang III : Data dan Informasi

4. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

- Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I
- Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II
- Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III

5. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:

- Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I
- Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II

- Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastuktur dan pengembangan wilayah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yatiu:

- Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
- Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II
- Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III

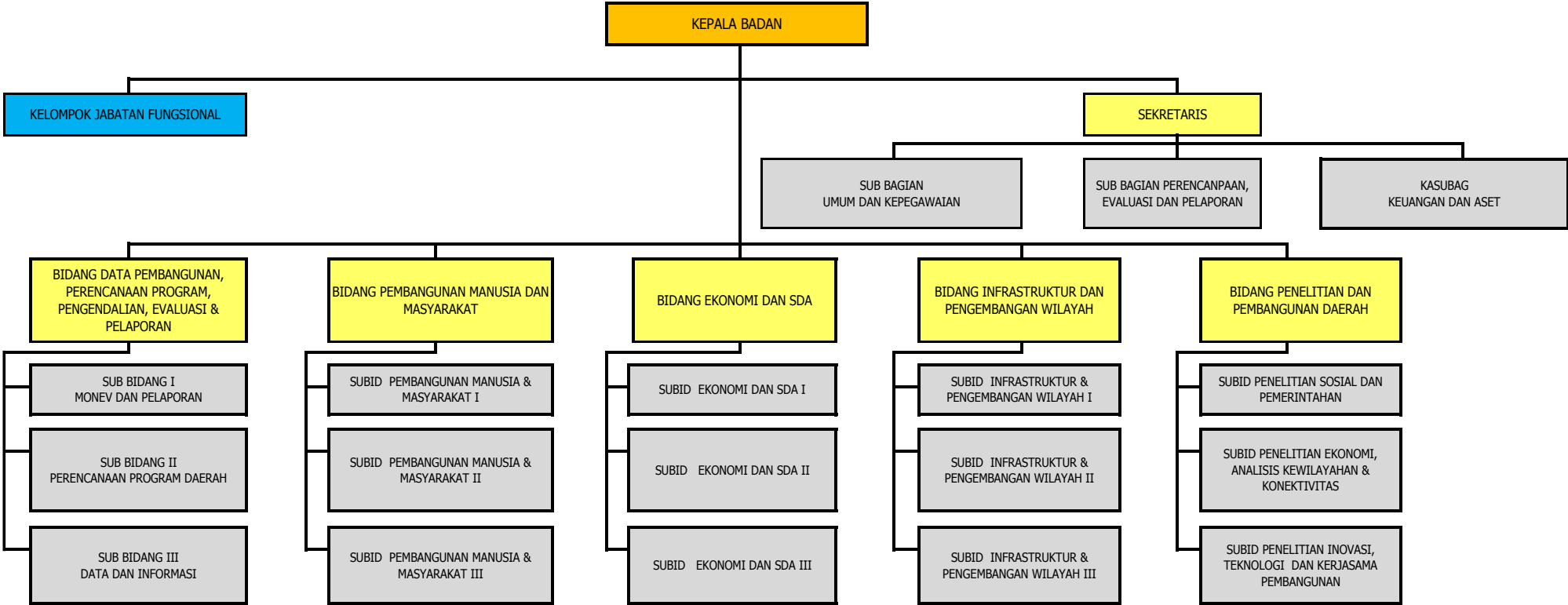
7. Bidang Penelitian dan Pembangunan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yatiu:

- Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan
- Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas
- Sub Bidang Penelitian Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan

Gambar I : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA PROVINSI MALUKU

(Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, tak terkecuali bagi Perangkat Daerah sehingga dapat menjawab sasaran strategis pembangunan daerah yang akan berdampak pada tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan sumber daya Bappeda Provinsi Maluku menurut bidang tugas secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 :

Jumlah Pegawai Menurut Bidang Tugas dan Gender

No	Bidang /Sub Bidang	Pegawai			
		ASN		Kontrak	
		P	L	P	L
1.	Kepala Bappeda		1		
	Sekretaris	1			
	- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	7	-	11
	- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	3	1	2
	- Sub Bagian Keuangan dan Aset	3	3	-	2
	Jumlah	12	14	1	15
		P	L	P	L
2	Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan				
	- Kepala Bidang	-			
	- Sub Bidang I : Monev dan Pelaporan	2	1	2	-

- Sub Bidang II : Perencanaan Program Daerah	2	2	1	2
- Sub Bidang III : Data dan Informasi	3	1	4	2
Jumlah	7	4	7	4

	P	L	P	L
--	----------	----------	----------	----------

3 Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
- Kepala Bidang		1		
- Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I	1	2	-	3
- Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II	3	1	1	1
- Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III	1	1	2	1
Jumlah	5	5	3	5

	P	L	P	L
--	----------	----------	----------	----------

4 Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam				
- Kepala Bidang		1		
- Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I	1	1	1	2
- Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II	2	1	1	1
- Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	1	3	1	4
Jumlah	4	6	3	7

	P	L	P	L
--	----------	----------	----------	----------

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
- Kepala Bidang		1		

- Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	2	1	1	2
- Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	2	1	-	2
- Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III	1	2	1	2
Jumlah	5	5	2	6
	P	L	P	L
6 Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah				
- Kepala Bidang		1		
- Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan	1	2	1	1
- Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas	2	1	1	-
- Sub Bidang Penelitian Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan	1	2	1	1
Jumlah	4	6	3	2
Total	37	39	19	39

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Maluku, 2019

Tabel 1 menunjukkan tingkat pendidikan, diklat kepemimpinan dan kepangkatan, maka jumlah ASN Bappeda Provinsi Maluku telah menunjukkan kualifikasi yang sangat baik. Hal ini akan berdampak pada kinerja Perangkat Daerah serta output dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Maluku dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, maupun bersinergi dan berkolaborasi untuk perencanaan yang berkualitas.

ASN Bappeda Provinsi Maluku adalah sebanyak 76 orang, dimana yang telah melalui jenjang pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 1 orang, Magister

(S2) sebanyak 22 orang, Sarjana (S1) sebanyak 42 orang, SLTA sebanyak 9 orang, SLTP sebanyak 1 orang, dan SD sebanyak 1 orang.

Selain itu juga ASN Bappeda Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tenaga kontrak/honor sebanyak 58 orang. Adapun jumlah ASN dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2 :
Pendidikan Pegawai Menurut Gender

No	Tingkat Pendidikan	P	L
1.	SD	-	1
2.	SMP	-	1
3.	SMA	2	7
4.	Sarjana (S1)	23	19
5.	Magister (S2)	9	13
6.	Doktor (S3)	-	1
Jumlah		34	42

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Maluku, 2019

Sedangkan jika dilihat dari kepangkatan/golongan dan Pendidikan Kepelatihan Kepemimpinan yang pernah diikuti maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3 :
Diklat Kepemimpinan ASN Bappeda Provinsi Maluku Menurut Gender

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	P	L	Total
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	6	7	13 Orang
2.	SPAMA/ DIKLATPIM III	2	5	7 Orang
3.	SPAMEN/ DIKLATPIM II			-
4.	LEMHANAS			-
Jumlah				21 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Maluku, 2019

ASN Bappeda Provinsi Maluku yang telah mengikuti jenjang pelatihan Diklat PIM IV sebanyak 13 orang ASN, Diklat PIM III sebanyak 7 orang ASN, sedangkan Diklat PIM II belum ada pejabat lingkup Bappeda Provinsi Maluku yang mengikuti.

Tabel 4 :
Jumlah ASN Bappeda Provinsi Maluku
Menurut Kepangkatan/Golongan dan Gender

No	Golongan	P	L	Jumlah
1.	IV	6	9	15

2.	III	29	25	54
3.	II	1	5	6
4.	I	-	1	1
Jumlah				76

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Maluku, 2019

Tabel 4 menunjukkan jumlah ASN Golongan IV sebanyak 15 orang, Golongan III sebanyak 54 orang, Golongan II sebanyak 6 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan komposisi ASN yang cukup baik untuk menjalankan tugas dan fungsi selaku perencana pembangunan di daerah.

b. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran juga sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya kerja-kerja perkantoran, untuk itu ketersediaan sarana dan prasarana dengan sendirinya juga dapat dianggap sebagai penunjang pencapaian tujuan organisasi, tidak terkecuali bagi Bappeda Provinsi Maluku. Sampai dengan tahun 2019, kondisi sarana dan prasarana Bappeda dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 :
Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Nama Barang/Asset	Jumlah
1	Tanah kosong yang sudah diperuntukan	10,000 M ²
2	Gedung Kantor Permanen	1 Unit
3	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	10 unit
4	Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	36 unit
5	Landing Shiping	1 unit
6	Meja Kerja Eselon II	1 buah
7	Kursi Kerja Eselon II	1 buah
8	Meja Kerja Eselon III	6 buah
9	Kursi Kerja Eselon III	6 buah
10	Meja Kerja Eselon IV	18 buah
11	Kursi Kerja Eselon IV	18 buah
12	Meja Kerja Staf	85 buah
13	Kursi Staf	96 buah
14	Meja Komputer	16 buah
15	Lemari Kayu	26 buah
16	Filling besi/metal	27 buah
17	Rak Kayu	3 buah
18	Filling Kayu	30 buah
19	AC Unit	8 buah
20	AC Split	4 buah
21	Printer	12 buah
22	Meja Rapat	14 buah
23	Kursi Rapat	20 buah
24	Kursi Rapat Pimpinan	3 buah
25	Laptop	21 buah
26	Notebook	22 buah
27	Mesin Ketik Manual	3 buah

28	TV	1 buah
29	Whiteboard Electric	1 buah
30	Brankas	5 buah
31	Rak besi	3 buah
32	Mesin Fotocopy biasa	1 buah
33	Sofa	1 set
34	Meja tamu	2 set
35	Proyektor + Attachment	3 buah
36	Sound sistem	1 Unit
37	Camera Electric	2 Unit
38	Faximile	1 Unit
39	Wireless Amplifier	2 Unit
40	Komputer	11 Unit
41	UPS	6 unit
42	Lukisan Lainnya	1 buah
Total		

Sumber : Sub Umum dan Kepegawaian Bappeda, 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Maluku dilakukan dengan cara melihat tingkat capaian indikator kinerja setiap tahunnya yang telah ditetapkan didalam Renstra Bappeda tahun 2014-2019 dan Reviu Renstra tahun 2017. Capaian Indikator Kinerja yang menggambarkan pelayanan perangkat daerah Bappeda provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 :
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra						Realisasi Capaian Renstra Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase koordinasi perencanaan provinsi, kab/kota dan pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
2	Jumlah orang yang mengikuti diklat/bintek tiap tahun	15 org	15 org	20 org	20 org	25 org	25 org		29 org	20 org	25 org	25 Org	
3	Persentase sarana dan prasarana (ruang kerja, perpustakaan, ruang arsip, laptop)	70%	80%	90%	100%	100%	100%	85 %	85 %	85 %	85 %	100%	
4	Jumlah dokumen perencanaan	6	7	8	8	9	9	8 dok.	8 dok.	8 dok.	8 dok.	8 dok.	
	1) Jumlah Buku data dasar perencanaan	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	
	2) Jumlah unit system informasi perencanaan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	
	3) Jumlah Laporan evaluasi, pelaporan, dan pengendalian	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	

6	Persentase koordinasi, pengkajian, dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase kegiatan yang konsisten terhadap arah kebijakan pembangunan	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	-	82,27 %
8	Persentase sasaran daerah yang tercapai 100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	-	40 %
9.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan di Provinsi	-	-	-	-	11 Kab./ Kota	11 Kab./ Kota	-	-	-	-	11 Kab. /Kota
10.	Persentase program yang tercapai 100%	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	-	85,46 %

Tabel 6 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Maluku selama periode Renstra tahun 2014-2019 menunjukkan kinerja yang sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian kinerja yang hampir keseluruhan target indikator yang ditetapkan dapat dicapai setiap tahun perencanaan. Bahkan terdapat juga indikator yang ditetapkan telah melampaui target. Indikator jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Diklat pada tahun 2015 dan tahun 2017 telah melampaui target, hal ini merupakan komitmen Bappeda Provinsi Maluku untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur perencanaan, mengingat kompleksnya permasalahan daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sebagai OPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah. Pengukuran indikator tersebut diatas dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2014 - 2018.

Selain itu juga perlu disampaikan bahwa dalam perjalanannya, indikator kinerja utama Bappeda Provinsi Maluku mengalami perubahan yang disesuaikan dengan penilaian akuntabilitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan juga penajaman indikator untuk peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah. Dari hasil perubahan indikator tahun 2017, maka ditetapkan 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perangkat daerah. Dari hasil pengukuran tersebut telah menunjukkan pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Maluku yang sangat baik pada keempat Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain kinerja pelayanan di atas, kinerja keuangan Bappeda Provinsi Maluku tahun 2014-2018 dapat disajikan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 :
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan
Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2014-2018

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Program Perencanaan Tata Ruang</i>	3.548.950.000	436.900.000	1.269.362.500	483.700.000	-	2.781.813.760	302.642.800	1.229.550.608	351.144.259	-
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Dari Aspek Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Teluk Ambon	0	0	985.000.000	0	0	0	0	976.927.000	0	0
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	480.750.000	236.900.000	284.362.500	483.700.000	0	363.155.700	209.124.000	252.623.608	351.144.259	0
Perubahan Perda RTRW	0	200.000.000	0	0	0	0	93.518.800	0	0	0
Penyusunan RDTR Kawasan Makariki	1.987.100.000	0	0	0	0	1.490.724.360	0	0	0	0
Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Penyusunan Profil Penataan Ruang Provinsi Maluku	190.550.000	0	0	0	0	146.921.200	0	0	0	0
Penyesuaian Perda RTRW Provinsi Maluku dengan SK Menhut Nomor: SK.871/Menhut-II/2013	200.000.000	0	0	0	0	158.876.200	0	0	0	0
Penyusunan Profil Penataan Ruang Provinsi Maluku	190.550.000	0	0	0	0	146.921.200	0	0	0	0
Penyesuaian Arah Pengembangan Maluku Berbasis Gugus Pulau	500.000.000	0	0	0	0	475.215.100	0	0	0	0
<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota</i>	0	184.400.000	0	-	-	0	155.727.800	0	0	-
Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota	0	184.400.000	0	0	0	0	155.727.800	0	0	0
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Maluku				0	0	0	0	0	0	0
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.193.298.000	1.554.420.000	1.328.868.000	1.599.384.000	1.477.225.000	875.953.998	1.349.922.662	1.183.849.571	1.375.373.493	1.242.351.950
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.002.000	7.500.000	7.500.000	9.513.000	9.498.000	10.002.000	7.500.000	7.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000	102.000.000	49.800.000	49.800.000	60.000.000	30.299.298	25.879.269	48.358.944	19.773.260	28.680.077

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000	24.000.000	18.000.000	30.100.000	40.000.000	16.390.000	10.339.200	11.549.625	16.779.375	13.806.875
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46.800.000	47.000.000	48.916.000	91.100.000	112.700.000	46.800.000	46.998.700	48.916.000	91.100.000	112.300.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70.000.000	105.000.000	50.000.000	65.284.000	0	69.300.000	103.830.000	48.300.000	64.250.000	0
Penyediaan Alat Tulis Kantor	173.838.000	160.000.000	170.000.000	140.000.000	140.000.000	173.838.000	160.000.000	170.000.000	138.000.000	137.410.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.200.000	143.500.000	89.350.000	84.000.000	95.000.000	85.189.800	143.500.000	89.350.000	83.500.000	92.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	120.000.000	150.600.000	146.700.000	0	00	118.150.000	0	146.700.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	66.040.000	141.500.000	81.200.000	112.900.000	158.125.000	42.890.000	123.780.000	80.500.000	112.000.000	149.700.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	443.400.000	555.400.000	645.500.000	624.900.000	520.200.000	268.060.400	503.596.493	551.069.802	614.369.706	418.012.624
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tenaga Teknis Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	176.020.000	153.820.000	134.100.000	243.200.000	197.000.000	133.673.500	113.751.000	93.803.200	228.101.152	135.741.874
Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	0	112.200.000	32.000.000	0	0	0	108.750.000	32.000.000	0	0

<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	1.082.000.000	2.590.490.000	1.073.471.000	1.634.177.000	1.522.459.000	1.026.522.000	2.425.570.900	891.735.400	1.124.902.340	896.211.970
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	80.000.000	720.000.000	482.600.000	682.600.000	69.000.000	67.080.000	635.518.000	469.682.000	682.489.120	64.050.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	88.000.000	0	0	66.600.000	25.000.000	86.750.000	0	0	0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	295.700.000	0	100.000.000	360.000.000	0	290.770.000	0	0	271.875.814
Pengadaan Mebeleur	0	180.000.000	70.000.000	0	0	0	180.000.000	70.000.000	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	477.000.000	606.790.000	520.871.000	652.477.000	573.524.700	437.709.000	546.382.900	352.053.400	298.187.250	282.456.378
Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	0	700.000.000	0	0	0	0	686.150.000	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000.000	0	0	0	85.500.000	496.733.000	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	166.534.300	0	0	0	0	160.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	199.100.000	201.300.000	0	0	0	144.225.970	117.829.778
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	0	133.000.000	169.000.000	130.000.000	45.360.000	0	70.500.000	159.663.000	54.610.000	45.360.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	133.000.000	169.000.000	130.000.000	45.360.000	0	70.500.000	159.663.000	54.610.000	45.360.000
Program Pengembangan Data/Informasi	2.494.115.000	1.408.550.000	846.100.000	985.000.000	1.204.524.000	1.697.950.800	1.290.760.289	745.209.307	819.094.523	602.903.100
Penyusunan dan pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.175.400.000	347.900.000	266.100.000	300.000.000	407.024.000	714.494.600	320.051.900	197.376.707	264.765.723	312.615.176
Pengembangan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Maluku	858.365.000	1.060.650.000	580.000.000	575.000.000	0	809.168.800	970.708.389	547.832.600	545.828.800	0
Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan	460.350.000	0	0	0	0	174.287.400	0	0	0	0
Penyusunan Buku Publikasi Ekonomi Tahunan	0	0	0	110.000.000	97.500.000	0	0	0	8.500.000	97.500.000
Pembuatan E-Planning terintegrasi E-Budgeting	0	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	192.787.924
Program Kerjasama Pembangunan	2.334.850.000	3.064.268.000	5.263.910.000	6.822.600.000	3.947.255.000	1.652.408.960	2.838.845.701	4.007.952.978	5.658.539.932	2.945.788.259
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	930.000.000	675.000.000	523.410.000	311.500.000	450.000.000	706.209.850	615.297.101	368.928.650	276.783.300	347.654.720
Koordinasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Daerah	613.650.000	1.010.000.000	518.200.000	440.000.000	313.700.000	365.476.000	949.103.800	307.406.434	368.678.634	240.271.783

Koordinasi dan Implementasi Program MDGs Maluku	228.200.000	150.000.000	0	0	0	178.182.810	122.232.300	0	0	0
Kajian Pengembangan Komuditas Unggulan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Implementasi Program MDGs Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kajian Mutu Pendidikan Sekolah di Maluku	0	548.518.000	600.000.000	0	0	0	532.652.000	563.125.000	0	0
Kerjasama Pembangunan Sektoral, Regional dan Gugus Pulau	163.750.000	184.400.000	221.300.000	250.600.000	0	122.149.200	174.003.500	146.325.369	186.391.800	0
Kerjasama Pembangunan dengan Lembaga Donor	162.950.000	0	0	0	250.000.000	124.911.900	0	0	0	223.338.780
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan	0	171.200.000	200.000.000	0	0	0	158.675.200	163.680.822	0	0
Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Gender	130.350.000	142.650.000	245.000.000	0	0	78.684.000	125.233.000	191.295.260	0	0
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Kegiatan UNICEF di Bidang Kesehatan	105.950.000	150.000.000	246.000.000	312.350.000	0	76.795.200	132.638.600	208.771.700	287.606.298	0
Pameran Kelitbang Nasional	0	32.500.000	0	0	0	0	29.010.200	0	0	0

Seminar International Agroforestry	0	0	700.000.000	0	0	0	0	651.432.743	0	0
Penyusunan Master Plan Science Techno Park (STP)	0	0	400.000.000	0	0	0	0	376.179.000	0	0
Koordinasi Persiapan Pendirian Institut Teknologi Ambon (ITA)	0	0	150.000.000	0	0	0	0	70.072.000	0	0
Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Institut Teknologi Ambon	0	0	1.400.000.000	0	0	0	0	922.100.000	0	0
FGD Kerbau Moa	0	0	60.000.000	0	0	0	0	38.636.000	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	331.867.676	0
Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	157.539.310	0
Kajian Pengembangan Inovasi Daerah	0	0	0	450.000.000	0	0	0	0	421.549.000	0
Kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku	0	0	0	1.400.000.000	280.000.000	0	0	0	1.120.000.000	280.000.000
Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	0	0	0	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	0
Workshop Potret Masa Depan Provinsi Kepulauan di Indonesia	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0

Jasa Konsultasi dan Asisten Ahli Pembangunan Daerah	0	0	0	890.000.000	505.375.000	0	0	0	801.723.914	473.343.162
Peghargaan Karya Pembangunan	0	0	0	580.000.000	0	0	0	0	567.750.000	0
Studi Resistensi Stabilitas Politik dan Keamanan pada Pilkada Serentak di Maluku Tahun 2018	0	0	0	350.000.000	210.000.000	0	0	0	140.000.000	210.000.000
Dukungan Kegiatan Pesta Teluk	0	0	0	38.150.000	50.000.000	0	0	0	38.150.000	24.000.000
Seminar Nasional IPTEK Perikanan Kelautan	0	0	0	300.000.000	275.000.000	0	0	0	10.500.000	275.000.000
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Regional	0	0	0	0	248.000.000	0	0	0	0	213.954.256
Penyusunan Road Map Pengembangan SDM di Maluku	0	0	0	0	319.180.000	0	0	0	0	56.920.725
Seminar Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) tentang Provinsi Berciri Kepulauan	0	0	0	0	277.600.000	0	0	0	0	35.579.003
Penyusunan RPJMD Tekhnokratik Provinsi Maluku Tahun 2019					768.400.000	0	0	0	0	565.725.830
<i>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</i>	680.500.000	0	0	0	184.479.500	629.458.300	0	0	680.227.166	145.719.679

Koordinasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku	680.500.000	0	0	0	0	629.458.300	0	0	680.227.166	0
Koordinasi Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau terluar di Provinsi Maluku	0	0	0	0	184.479.500	0	0	0	0	145.719.679
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	661.700.000	3.850.000.000	2.189.350.000	850.000.000	160.000.000	616.358.600	3.742.343.400	2.141.264.700	680.227.166	160.000.000
Koordinasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	261.700.000	200.000.000	189.350.000	0	0	234.518.300	185.460.400	154.768.200	0	0
Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil	400.000.000	0	0	0	0	381.840.300	0	0	0	0
Penyusunan Masterplan Pengembangan Wilayah Terpadu Provinsi Maluku	0	250.000.000	0	0	0	0	184.751.600	0	0	0
Masterplan Pengembangan Gugus Pulau I,II,VI,VIII,IX,X	0	1.800.000.000	0	0	0	0	1.781.328.400	0	0	0
Masterplan Pengembangan Gugus Pulau II,IV,V,VII,XI,XII	0	0	1.600.000.000	0	0	0	0	1.599.999.500	0	0
Pemotretan Udara dan Pemetaan Skala 1:5000 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Banda	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0
Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Banda	0	1.000.000.000	0	0	0	0	990.803.000	0	0	0

Kajian Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Banda	0	0	400.000.000	0	0	0	0	386.497.000	0	0
Penyusunan Detail Desain Pengembangan Gugus Pulau I-XII Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Road Map Pengembangan Wilayah Provinsi Maluku	0	0	0	850.000.000	160.000.000	0	0	0	680.227.166	160.000.000
<i>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</i>	<i>955.800.000</i>	<i>581.945.000</i>	<i>-</i>	<i>610.000.000</i>	<i>539.595.500</i>	<i>713.761.052</i>	<i>499.587.800</i>	<i>-</i>	<i>508.991.523</i>	<i>467.896.972</i>
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi	247.900.000	200.000.000	0	0	0	169.568.600	154.004.600	0	0	0
Koordinasi Perencanaan dan Implementasi MP3EI	522.200.000	0	0	0	0	396.968.052	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Implementasi MP3EI	0	212.725.000	0	0	0	0	196.881.000	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat-Pusat Industri	185.700.000	169.220.000	0	210.000.000	250.298.000	147.224.400	148.702.200	0	189.104.623	224.681.872
Koordinasi Peningkatan Ekonomi, Investasi dan Dunia Usaha, Koperasi dan UMKM	0	0	0	400.000.000	289.297.500	0	0	0	319.886.900	243.215.100
<i>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>522.800.000</i>	<i>548.850.000</i>	<i>682.600.000</i>	<i>465.800.000</i>	<i>599.068.000</i>	<i>237.011.440</i>	<i>425.139.700</i>	<i>534.631.517</i>	<i>340.671.303</i>	<i>432.922.501</i>

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	422.800.000	465.000.000	338.100.000	356.600.000	449.868.000	208.181.440	342.875.700	230.528.389	241.957.314	297.789.432
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100.000.000	83.850.000	106.000.000	109.200.000	149.200.000	28.830.000	82.264.000	98.691.128	98.713.989	135.133.069
Peningkatan Kemampuan teknis Aparatur Keuangan	0	0	238.500.000	0	0	0	0	205.412.000	0	0
Penguatan Kapasitas Kelitbangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	300.000.000	204.925.000	380.000.000	-	-	231.030.601	183.505.560	334.058.311	-	-
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Maluku	0	204.925.000	380.000.000	0	0	0	183.505.560	334.058.311	0	0
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Maluku	300.000.000	0	0	0	0	231.030.601	0	0	0	0
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.779.800.000	4.961.475.000	5.084.960.000	7.930.442.000	5.783.039.000	3.975.526.540	4.036.048.016	4.175.651.535	5.013.304.922	4.531.539.376
Penyusunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2013-2018	689.950.000	0	0	0	0	526.028.000	0	0	0	0
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	548.500.000	0	0	0	0	446.625.800	0	0	0	0

Penyusunan Rancangan RKPD, KUA, PPAS, RKPD Perubahan, KUA dan PPAS Perubahan APBD	635.750.000	561.000.000	561.000.000	749.400.000	679.400.000	603.952.300	518.513.849	458.801.900	601.624.475	607.716.477
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	940.000.000	804.250.000	920.660.000	1.300.000.000	722.850.000	763.927.240	681.433.700	628.276.511	996.153.767	512.557.224
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	239.700.000	255.680.000	0	0	0	229.740.500	167.642.030	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	300.000.000	255.680.000	300.000.000	201.640.000	300.000.000	285.066.200	234.356.937	250.568.100	175.730.699	271.797.116
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	700.000.000	651.400.000	630.300.000	595.500.000	492.050.000	504.700.300	567.262.200	536.177.539	478.597.128	411.837.844
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Responsif Gender.	200.900.000	276.300.000	0	0	0	154.914.400	224.142.100	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Penguatan Program Reformasi Birokrasi	335.000.000	0	0	0	0	276.121.700	0	0	0	0
Penyusunan RENSTRA	190.000.000	0	0	0	42.325.000	184.450.100	0	0	0	42.325.000
Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)	0	360.000.000	262.950.000	376.500.000	228.800.000	0	297.220.100	205.239.199	311.772.000	83.085.000

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Anti Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	0	580.000.000	498.650.000	481.083.000	547.958.000	0	521.650.600	407.207.286	419.239.586	404.261.983
Rapat Kerja Pemerintah Daerah	0	767.165.000	411.400.000	825.819.000	366.791.000	0	476.982.300	199.730.000	673.276.400	275.588.500
Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Maluku	0	200.000.000	1.500.000.000	0	0	0	194.013.200	1.489.651.000	0	0
Penyerasian Dokumen RPJMD dan RPJMN	0	250.000.000	0	0	0	0	152.831.000	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	0	247.500.000	0	0	0	0	227.309.548	0
Review Rencana Strategis (RENSTRA)	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	29.940.000	0
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	0	0	0	200.000.000	252.300.000	0	0	0	123.184.097	219.751.187
Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0	0	0	273.000.000	249.750.000	0	0	0	220.284.792	219.522.700
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	0	0	2.000.000.000	314.500.000	0	0	0	169.613.134	265.702.078

Evaluasi RPJP Provinsi Maluku Tahun 2005-2025	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0	539.079.296	
Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK)	0	0	0	50.000.000	439.000.000	0	0	0	47.500.000	361.173.740
Musyawahar Khusus dan Workshop Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0	0	154.115.000	0	0	0	0	138.922.620
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019	0	0	0	0	267.700.000	0	0	0	0	228.239.667
Penyusunan Evaluasi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	241.200.000
Penyelenggaraan Musrenbang Regional	0	0	0	0	51.900.000	0	0	0	0	30.108.000
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	217.750.240
Sosialisasi Permendagri 86 Tahun 2017	0	0	0	0	123.600.000	0	0	0	0	0
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	721.350.000	3.651.600.000	2.145.550.000	932.400.000	2.966.024.000	487.613.400	3.213.726.002	1.789.202.049	708.838.804	2.354.291.942
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	163.550.000	370.000.000	328.000.000	0	0	123.613.800	338.786.200	266.282.300	0	0

Perencanaan Pengembangan Bisnis Development Service (BDS)	150.000.000	0	0	0	0	126.750.000	0	0	0	0
Penyusunan Tabel Input Output Daerah	0	746.300.000	0	0	0	0	708.004.400	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Peningkatan Iklim Investasi dan Dunia Usaha	0	264.050.000	0	0	0	0	243.397.300	0	0	0
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian RAD Pangan dan Gizi	407.800.000	219.100.000	0	0	328.675.000	237.249.600	182.634.902	0	0	283.043.562
Koordinasi Pembangunan Pariwisata	0	250.000.000	0	200.000.000	248.869.000	0	185.289.800	0	156.927.182	223.002.700
Koordinasi Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	189.800.000	0	0	0	0	142.818.903	0	0
Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	0	335.800.000	260.700.000	201.200.000	230.750.000	0	273.665.500	193.620.580	150.436.711	182.665.366
Sosialisasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019	0	0	0	330.000.000	0	0	0	0	250.975.513	0
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal Responsif Gender	0	240.325.000	0	0	0	0	214.250.500	0	0	0
Penyusunan ICOR Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja dan Rencana Pembangunan Pasar Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kajian Potensi Penerimaan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah	0	481.425.000	0	0	0	0	468.224.700	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kelautan Perikanan	0	375.500.000	182.000.000	201.200.000	244.230.000	0	273.372.700	135.996.600	150.499.398	190.127.165	
Evaluasi Rantai Pasok Komoditas Pertanian dan Perikanan	0	369.100.000	0	0	0	0	326.100.000	0	0	0	0
Penyusunan Asumsi Makro Ekonomi	0	0	190.650.000	0	0	0	0	173.879.000	0	0	0
Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku Berbasis Maritim	0	0	600.000.000	0	0	0	0	583.804.096	0	0	0
Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan Koperasi dan UMKM	0	0	248.600.000	0	0	0	0	173.490.500	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Penganggaran Kemaritiman Dunia Usaha	0	0	145.800.000	0	0	0	0	119.310.070	0	0	0
Penyusunan Road Map Pertanian Konservasi Lahan Kering di Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi pulau Manipa	0	0	0	0	650.000.000	0	0	0	0	0	639.965.273
Penyusunan Road Map Pengembangan Industri Pala	0	0	0	0	750.000.000	0	0	0	0	0	448.058.506

Penyusunan RAD SDGs Provinsi Maluku Tahun 2016-2030	0	0	0	0	513.500.000	0	0	0	0	387.429.370
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	586.900.000	849.600.000	979.538.500	1.083.000.000	1.863.925.000	376.259.400	758.921.150	795.970.348	960.142.667	1.574.403.025
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid.Sosial dan Budaya	156.150.000	153.000.000	0	0	369.600.000	116.126.600	138.867.000	0	0	286.981.413
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan UNICEF	0	0	0	0	266.500.000	0	0	0	0	244.281.198
Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	209.850.000	0	0	0	0	150.211.200	0	0	0	0
Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Rencana Aksi Pembangunan Bidang Pendidikan	220.900.000	0	0	0	0	109.921.600	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan	0	167.600.000	0	0	0	0	153.458.900	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	0	165.000.000	0	0	256.200.000	0	139.098.900	0	0	194.124.950
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan	0	184.400.000	0	0	0	0	169.187.450	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Bidang Pendidikan	0	179.600.000	0	0	0	0	0	158.308.900	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	374.965.000	0	0	0	0	0	316.883.693	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	0	0	323.500.000	0	0	0	0	0	250.286.770	0	0
Kajian Pengembangan Institut Teknologi Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	0	0	281.073.500	0	0	0	0	0	228.799.885	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0	283.109.800	0
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	209.082.466	0
Koordinasi Persiapan Pendirian Kembali Institut Teknologi Ambon	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	134.950.401	0
Studi Kelayakan Pembangunan Institut Teknologi Ambon	0	0	0	333.000.000	0	0	0	0	0	333.000.000	0

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Vokasi	0	0	0	0	213.500.000	0	0	0	0	189.794.518
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Maluku	0	0	0	0	226.450.000	0	0	0	0	193.221.219
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Maluku	0	0	0	0	262.100.000	0	0	0	0	229.045.859
Koordinasi dan Evaluasi RAD Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	80.600.000	0	0	0	0	75.438.000
Koordinasi Perencanaan Perluasan Kesempatan Kerja	0	0	0	0	188.975.000	0	0	0	0	161.515.868
<i>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</i>	1.508.000.000	3.133.420.000	2.108.575.000	2.603.000.000	2.834.477.000	1.217.119.464	2.859.297.204	1.792.804.960	2.220.221.538	1.573.664.675
Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	185.850.000	197.570.000	250.000.000	200.000.000	295.000.000	168.129.600	163.429.400	214.239.500	135.441.937	255.834.029
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	0	0	0	175.000.000	0	0	0	0	138.528.201	0
Koordinasi Perencanaan pembangunan Transportasi	168.700.000	200.000.000	250.000.000	0	0	145.313.750	150.777.200	214.239.500	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Program Percepatan Pembangunan	239.650.000	0	0	0	0	162.117.410	0	0	0	0

Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Air	157.900.000	0	0	0	0	142.747.004	0	0	0	0
Koordinasi Penyelesaian Masalah-Masalah Bidang Energi Kelistrikan serta Informasi Komunikasi	173.050.000	0	0	0	0	141.801.100	0	0	0	0
Pengembangan Sistem Informasi Ketransportasian	213.100.000	200.000.000	0	0	0	190.473.100	179.419.000	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Transportasi kepulauan	141.550.000	0	0	0	0	76.131.000	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Sistem Transportasi Laut	2.700.000	0	0	0	0	1.576.800	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	225.500.000	327.825.000	0	0	0	188.829.700	324.874.700	0	0	0
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Trans Maluku	0	200.000.000	0	0	0	0	172.494.200	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	0	183.750.000	176.300.000	0	0	0	171.222.500	145.658.000	0	0

Evaluasi Kinerja Sistem Transportasi Laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Air	0	181.900.000	0	0	0	0	162.733.600	0	0	0	0
Penyusunan Sistem Logistik Daerah Provinsi Maluku	0	750.000.000	0	0	0	0	708.338.304	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Energi, Telekomunikasi dan Informasi	0	184.150.000	281.050.000	300.000.000	0	0	165.977.200	209.310.099	271.793.000	0	0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS	0	180.800.000	192.550.000	0	0	0	167.990.700	158.383.300	0	0	0
Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0	199.600.000	28.575.000	0	0	0	167.165.700	24.430.687	0	0	0
Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan	0	327.825.000	0	0	0	0	324.874.700	0	0	0	0
Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku Berbasis Maritim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	0	0	180.100.000	178.000.000	197.847.500	0	0	105.475.000	116.279.400	167.860.172	0
Penyusunan Masterplan Pembangunan Institut Teknologi Ambon	0	0	0	1.550.000.000	150.000.000	0	0	0	1.385.841.000	150.000.000	0

Persiapan Pembangunan Kebun Binatang dan Kebun Raya	0	0	250.000.000	0	0	0	0	221.068.874	0	0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi	0	0	0	200.000.000	196.950.000	0	0	0	172.338.000	173.018.419
Fasibility Study Kebun Binatang	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAMSIMAS dan PPSP	0	0	0	0	202.872.500	0	0	0	0	163.133.600
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ke-PU-an	0	0	0	0	273.613.000	0	0	0	0	208.369.960
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Informasi dan Telekomunikasi	0	0	0	0	178.344.000	0	0	0	0	163.803.300
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan	0	0	0	0	207.850.000	0	0	0	0	182.405.300
Pengadaan NGO Service	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program AWP,RKA-KL	0	0	0	0	320.000.000	0	0	0	0	109.239.895
Kampanye Penyadaran Publik	0	0	0	0	185.000.000	0	0	0	0	0

Sosialisasi FMSRB	0	0	0	0	185.000.000	0	0	0	0	0
Workshop tentang LARAPS	0	0	0	0	187.000.000	0	0	0	0	0
Operasional dan Sarana Penunjang Sekretariat Program FMSRB	0	0	0	0	145.000.000	0	0	0	0	0
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Manajemen banjir	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	-	-	577.000.000	426.050.000	-	-	-	444.000.000	334.063.758
Pemanfaatan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Maluku	0	0	0	577.000.000	0	0	0	0	444.000.000	0
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Maluku	0	0	0	0	426.050.000	0	0	0	0	334.063.758
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	163.700.000	-	160.000.000	-	270.925.000	127.740.100	-	155.500.000	0	238.223.412
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	163.700.000	0	0	0	0	127.740.100	0	0	0	0
Analisa Dampak Lingkungan Pemanfaatan/Pengelolaan Mineral di Pulau Romang	0	0	160.000.000	0	0	0	0	155.500.000	0	0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmonisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Maluku	0	0	0	0	270.925.000	0	0	0	0	238.223.412
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capian Keuangan	0	0	0	200.000.000	341.400.000	0	0	0	189.210.925	330.028.705
Peningkatan Kualitas/Laporan Keuangan Manajemen Aset	0	0	0	200.000.000	341.400.000	0	0	0	189.210.925	330.028.705
Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam	0	0	0	1.600.000.000	300.000.000	0	0	0	1.250.314.900	300.000.000
Kajian Dokumen Lingkungan KEK Banda	0	0	950.000.000	1.600.000.000	300.000.000	0	0	0	1.250.314.900	300.000.000
<i>J u m l a h</i>	<i>21.533.763.00</i> <i>0</i>	<i>27.153.843.00</i> <i>0</i>	<i>23.681.285.00</i> <i>0</i>	<i>28.506.503.00</i> <i>0</i>	<i>24.465.806.00</i> <i>0</i>	<i>16.646.528.41</i> <i>5</i>	<i>24.152.538.98</i> <i>4</i>	<i>19.937.044.28</i> <i>4</i>	<i>22.379.815.46</i> <i>1</i>	<i>18.175.369.32</i> <i>4</i>

Tabel 8:**Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014- 2018**

NO	BELANJA	PAGU					REALISASI					Ratio Pertumbuhan Belanja			
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Langsung	22.079.913.000	26.826.018.000	25.719.285.000	27.160.503.000	24.465.806.000	17.167.807.140	23.827.664.584	20.842.569.897	22.033.441.261	18.175.569.334	21,50	(4,13)	5,60	(9,92)
2	Belanja Tidak Langsung	5.278.554.899	6.417.644.562	6.997.510.545	7.681.362.031	7.508.714.822	4.954.331.615	6.033.964.081	6.911.977.253	7.455.364.396	6.997.095.482	21,58	9,04	9,77	(2,25)
Total		27.358.467.899	33.243.662.562	32.716.795.545	34.841.865.031	31.974.520.822	22.122.138.755	29.861.628.665	27.754.547.150	29.488.805.657	25.172.664.816	43,07	4,91	15,38	(12,17)

Tabel 8 menunjukkan adanya perbandingan besaran pengelolaan program dalam bentuk anggaran keuangan yang anggarkan di Bappeda Provinsi Maluku untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola perencanaan di daerah. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran dari tahun 2014-2018 pada DPA dan rasio pertumbuhan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah anggaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan tertinggi untuk Belanja Langsung terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,50 %. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi tingginya rasio pertumbuhan Belanja Langsung adalah realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Maluku sangat efektif dan tepat waktu sesuai dengan alur kas yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya dukungan ketersediaan keuangan daerah sebagai faktor eksternal juga turut mempengaruhi tingginya rasio pertumbuhan belanja langsung. Pertumbuhan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,13%. Hal ini disebabkan karena terjadi rasionalisasi APBD yang cukup besar sehingga mempengaruhi jalanya pelaksanaan program dan kegiatan

Bappeda Provinsi Maluku pada tahun tersebut. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung, rasio pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2014 sebesar 21,58 %, hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan pagu APBD yang cukup signifikan. Pertumbuhan terendah pada tahun 2017 sebesar 2,25 % karena terjadinya rasionalisasi terhadap APBD tahun berkenaan yang cukup signifikan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam kedudukan dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku, memiliki ruang lingkup pelayanan sangat luas. Sebagai unsur perencana dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta melakukan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan. Selain itu juga selama kurun waktu periode perencanaan yang telah lalu, Bappeda Provinsi Maluku telah berhasil menerapkan sistem perencanaan pembangunan secara terintegrasi (*e-planning*) antara Perangkat Daerah di Provinsi Maluku maupun dengan Kabupten/Kota se-Maluku kedalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, hal ini sejalan dengan amanat UU nomor 25 tahun 2004, pada pasal 31 bahwa perencanaan dan pembangunan di daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Tantangan-tantangan yang akan

dihadapi oleh Bappeda Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diperkirakan sebagai berikut :

A. Tantangan....

1. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan antar Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Semakin akuntabelnya penyelenggaraan pemerintahan sehingga menuntut perencanaan pembangunan yang akurat dan transparan.
3. Persentase angka kemiskinan masih relatif tinggi dan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan sesuai RPJMD periode sebelumnya belum mencapai target sesuai perencanaan
4. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah berbasis gugus pulau untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah.
5. Belum terintegrasinya e-planning dengan e-budgeting
6. Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan belum maksimal.
7. Belum konsistennya dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan yang tepat waktu.

B. Peluang....

Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda adalah:

1. Tersedianya kualitas sumber daya aparatur yang terdiri dari latar belakang pendidikan formal yang berbeda pendidikan dan kepelatihan yang telah diikuti.
2. Adanya forum-forum perencanaan pembangunan sebagai fasilitas resmi untuk merencanakan pembangunan daerah kedepannya.
3. Perencanaan pembangunan daerah *e-planning* akan terintegrasi dengan dokumen perencanaan anggaran daerah (*e-budgeting*) untuk mewujudkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku.

Identifikasi permasalahan dalam pelayanan Perangkat Daerah perlu dilakukan untuk melihat efektifitas pelayanan publik dari perangkat daerah tersebut. Selain itu, indentifikasi permasalahan juga sebagai indikator untuk menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Ketepatan untuk mengidentifikasi permasalahan secara akurat dan bersifat strategis akan berdampak pada meningkatnya akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan untuk pembangunan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan sebagai landasan pelayanan Perangkat Daerah untuk senantiasa dapat menyelaraskan dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat.

Ketepatan dan kecermatan melakukan identifikasi permasalahan oleh Perangkat Daerah, maka isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang diangkat menjadi isu strategis oleh Perangkat Daerah adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Periode Renstra Tahun 2019-2024, Bappeda Provinsi Maluku menetapkan kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengacu pada kondisi kinerja pelayanan selama periode Renstra sebelumnya sebagai akibat dari dinamika pembangunan yang terus bergerak. Maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai tugas dan fungsi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terpadunya perencanaan Pembangunan antar Tingkat Pemerintahan.

Salah satu tujuan dalam perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengintegrasikan pembangunan antar daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah). Dengan adanya tujuan tersebut, maka perencanaan pembangunan haruslah memiliki keterkaitan antar wilayah dan antar tingkatan sehingga akan tercipta konsistensi serta dapat mengintegrasikan perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan pembangunan dimaksud.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka akar permasalahannya adalah:

- a) Perbedaan periode perencanaan antar level pemerintahan.
- b) Belum terselenggaranya fungsi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan dokumen perencanaan.
- c) Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan.

2. Rendahnya Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah yang terdiri atas: 1). Kapasitas SDM Perencanaan Perangkat Daerah dan, yang terkait dengan keikutsertaan ASN pada Bimtek/Diklat untuk menunjang Perencanaan Pembangunan di Daerah 2). Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja perkantoran Salah satu kunci keberhasilan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah juga ditunjang oleh kapasitas kelembagaan.

Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (keikutsertaan mengikuti diklat/bimtek) dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran merupakan salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi Maluku yang masih perlu untuk dilakukan pembenahan sehingga akan menghasilkan kondisi yang optimal. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana sudah dirasa cukup memadai dimana hal ini ditunjang dengan tingkat pendidikan ASN Bappeda Provinsi Maluku serta fasilitas yang sudah tersedia sekarang ini, namun dirasa perlu untuk peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka akar masalahnya adalah:

- a) ASN lingkup Bappeda Provinsi Maluku belum mengikuti diklat/bimtek Perencanaan sesuai kebutuhan dan kompetensi.

- b) Penempatan ASN lingkup Bappeda Provinsi Maluku belum sesuai keahlian dan Kebutuhan.
 - c) Ruang Kerja di kantor Bappeda yang belum representatif sehingga berdampak terhadap kondisi kinerja ASN.
 - d) Terbatasnya Sarana Penunjang Pekerjaan (Laptop, AC, Infokus, Printer, Meja, Kursi dll).
3. Belum Efektifnya Fungsi Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan.

Proses pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melaksanakan suatu rangkaian yang terstruktur yang dimulai dari perencanaan, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 8 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu proses/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Berdasarkan pemahaman diatas, maka pentingnya pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan monitoring oleh Bappeda Provinsi Maluku sebagai Perangkat Daerah yang berkompeten terhadap proses perencanaan di daerah sehingga akan menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan

yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Maluku.

Dari Permasalahan tersebut diatas, maka akar masalahnya adalah:

- a) Belum optimalnya implementasi pengendalian perencanaan di tingkat OPD Provinsi Maluku dan 11 Kabupaten/Kota se-Maluku.
 - b) SOP Pelayanan administrasi, perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan belum terimplementasi dengan baik.
 - c) Belum efektifnya proses verifikasi dokumen perencanaan OPD.
 - d) Belum optimalnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
 - e) Belum adanya keseragaman data pembangunan antar sektor.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan serta Teknologi informasi.

Salah satu kegagalan dalam proses pembangunan kita adalah terbatasnya data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan. Data yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya data dari hasil-hasil kajian akademik maupun data berupa informasi yang didapat pada forum Musrenbang, maupun Forum Konsultasi Publik. Dilain pihak, penggunaan informasi dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting kedudukannya untuk membangun sistem perencanaan yang terintegrasi dan transparansi antar Perangkat Daerah baik vertikal maupun horisontal. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah pasal 274 telah mengamanatkan kita untuk memanfaatkan data dan informasi dalam proses Perencanaan Pembangunan daerah harus didasarkan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Dari Permasalahan tersebut diatas, maka akar masalahnya adalah:

- a) Kurangnya inovasi untuk menunjang perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.
 - b) Sistem aplikasi e-monev belum tersedia sehingga efektifitas evaluasi perencanaan pembangunan belum maksimal.
 - c) Belum terealisasinya satu data pembangunan di daerah.
 - d) Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan data dan teknologi informasi di Bappeda Provinsi Maluku.
5. Belum terciptanya keserasian antara kebutuhan pembangunan bidang kelitbangan dan perencanaan pembangunan bidang kelitbangan.

Salah satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Demikian halnya juga dengan perencanaan pembangunan bidang kelitbangan haruslah berjalan terintegrasi, sinkronisasi dan terstruktur dalam suatu perencanaan yang sistematis untuk menyikapi permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah baik yang terjadi dalam tahun perencanaan maupun periode perencanaan jangka menengah.

Dari Permasalahan tersebut diatas, maka akar masalahnya adalah; Belum optimalnya fungsi kelitbangan dan kerjasama pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan bidang perencanaan dapat di petakan pada tabel 9 berikut:

Tabel 9 :

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah



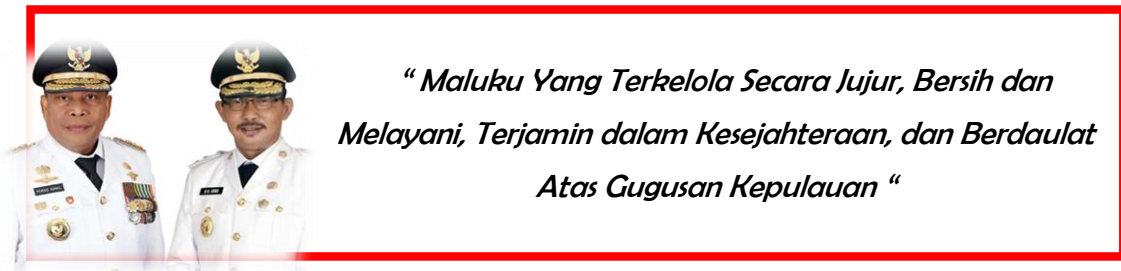
- Terbatasnya Sarana Penunjang Pekerjaan (Laptop, AC, Infokus, Printer, Meja, Kursi dll).
3. Belum Efektifnya Fungsi Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan
- Belum optimalnya implementasi pengendalian perencanaan di tingkat OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku
 - SOP Pelayanan administrasi, perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan belum terimplementasi dengan baik
 - Belum efektifnya proses verifikasi dokumen perencanaan OPD
 - Belum optimalnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan serta teknologi informasi
- Belum berkembangnya budaya inovasi dalam menunjang proses perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.
 - Sistem aplikasi e-monev belum tersedia sehingga efektifitas evaluasi perencanaan pembangunan belum maksimal
 - Belum terealisasinya satu data pembangunan di daerah
 - Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan data dan teknologi informasi di Bappeda Provinsi Maluku
5. Belum terciptanya keserasian antara
- Belum optimalnya fungsi kelitbangan dan kerjasama pembangunan daerah

kebutuhan
pembangunan
bidang
kelitbangan dan
perencanaan
pembangunan
bidang
kelitbangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan pada kondisi dan karakteristik kewilayahan Provinsi Maluku yang terdiri dari 12 gugus didominasi oleh lautan, maka Visi dan Misi sebagai penuntun arah pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Visi



Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan dan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024 sebagai berikut:

b. Misi

1. Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah Dan Terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan guru dan murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri

kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

4. Peningkatan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku.

5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku, dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri Dan Berprestasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok

rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (*no one left behind*).

3.3. Telaahan Renstra BAPPENAS tahun 2015 - 2019

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai unsur pemerintah memiliki fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional diantaranya:

- *Pertama*, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.
- *Kedua*, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pembinaan perencanaan, peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas kebijakan pembangunan. Dalam menjalankan pembinaan perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas tidak saja mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas perencana internal kelembagaan, namun juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas perencana di Kementerian/Lembaga maupun perencana Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, maka Bappenas menetapkan visi “ **Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel** ” .

Untuk menerjemahkan visi diatas, Bappenas menetapkan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk menjawab visi dan misi diatas, Bappenas merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sesuai dengan Resntra Bappenas antara lain:

TUJUAN

- Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
- Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan

SASARAN

- Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
- Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian

yang baik dan bersih di
Kementerian PPN/Bappenas

PPN/Bappenas yang baik dan
bersih

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan RTRW Provinsi Maluku

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku tahun 2013-2033. Perda tersebut di tetapkan untuk menjamin adanya pola pemanfaatan ruang yang efisien sesuai peruntukan kawasan yang telah ditetapkan.

Rencana Struktur Ruang Wilayah diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana wilayah, seperti sistem jaringan transportasi. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku dilakukan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi di sekitarnya, hasil analisis dan kecenderungan perkembangan pusat-pusat kegiatan yang ada di Provinsi Maluku, wilayah pengembangan, konsep Gugus Pulau serta mitigasi bencana alam.

Pengembangan kawasan di Provinsi Maluku mengacu pada beberapa tipe pengembangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu:

1). Sistem Perkotaan Nasional. Beberapa Pusat Perkotaan di Provinsi Maluku akan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sebagai sistem perkotaan nasional antara lain:

- Kota Ambon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- Kota-kota Masohi, Werinama, Kairatu, Tual, Namlea sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- Kota-kota Saumlaki, Ilwaki, Dobo sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2). Kawasan Andalan Tingkat Nasional. Kawasan andalan akan dikembangkan sesuai dengan keunggulan masing-masing kawasan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah.

3). Kawasan Strategis Nasional. Pemerintah Pusat menetapkan tiga bagian wilayah Provinsi Maluku sebagai kawasan strategis secara nasional. Kawasan-kawasan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Perbatasan Laut RI dengan negara Timor Leste/Australia;
- b. Kawasan Laut Banda; dan
- c. Kawasan Perbatasan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang berhadapan dengan laut lepas.

4). Pelabuhan Sebagai Simpul Transportasi Laut Nasional

Pemerintah Pusat juga menetapkan beberapa pelabuhan di Provinsi Maluku sebagai pelabuhan nasional, yaitu Ambon, Dobo dan Saumlaki. Sedangkan pelabuhan internasional di Provinsi Maluku tidak ada/tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

5). Bandar Udara Sebagai Simpul Transportasi Udara Nasional

Adapun bandar udara di Provinsi Maluku yang ditetapkan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut : Pusat Penyebaran Tersier: Pattimura, Olilit/Saumlaki Baru. Sedangkan Pusat Penyebaran Primer dan Pusat Penyebaran Sekunder tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6). Wilayah Sungai (W) Nasional

Beberapa wilayah sungai di Maluku ditetapkan sebagai wilayah sungai nasional, yaitu: Pulau Buru, Pulau Ambon – Seram, Kepulauan Kei – Aru, dan Kepulauan Yamdena – Wetar.

Pola perwilayahan di Provinsi Maluku sesuai kondisi fisik daerahnya yang merupakan pulau-pulau, telah dilakukan pendekatan konsep Gugus Pulau (GP) yang mana di setiap GP ditetapkan satu pusat utama atau Pusat GP. Untuk menentukan pusat GP digunakan beberapa pertimbangan antara lain tata jenjang pusat pelayanan dan jangkauannya, karakteristik kota dan wilayah sekitarnya, kebijakan yang terkait dan hasil analisis pola perwilayahan gugus pulau yang telah dilakukan sebelumnya. Penentuan pola perwilayahan di Provinsi Maluku mengacu pada faktor pertimbangan di atas sehingga diperoleh suatu pola yang optimal dan efisien, serta pemerataan dalam pelayanan fasilitas kehidupan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka di Provinsi Maluku telah ditetapkan 12 Gugus Pulau (GP). Setiap gugus pulau tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing sesuai dengan daya jangkau pusat-pusat gugus dan pulau-pulau di

sekitarnya, dan sesuai kriteria penetapan Gugus Pulau tersebut diatasditetapkan penetapan Gugus Pulau sebagai berikut:

- (1). Gugus Pulau I, Pulau Buru dengan pusat pelayanan di Kota Namlea;
- (2). Gugus pulau II, Seram Barat dengan pusat pelayanan di Kota Piru dan Kairatu;
- (3). Gugus Pulau III, Seram Utara dengan pusat pelayanan di Kota Wahai;
- (4). Gugus Pulau IV, Seram Timur dengan pusat pelayanan di Kota Bula;
- (5). Gugus Pulau V, Seram Selatan dengan pusat pelayanan di Kota Masohi
- (6). Gugus Pulau VI, Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua dengan pusat pelayanan di Kota Bandaneira;
- (7). Gugus Pulau VII, Ambon dan PP Lease dengan pusat pelayanan di Kota Ambon;
- (8). Gugus Pulau VIII, Kepulauan Kei dengan pusat pelayanan Kota Tual;
- (9). Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru dengan pusat pelayanan Kota Dobo;
- (10). Gugus pulau X, Kepulauan Tanimbar dengan pusat pelayanan Kota Saumlaki;
- (11). Gugus Pulau XI, Kepulauan Babar dengan pusat pelayanan Kota Tapa;
- (12). Gugus Pulau XII, Kepulauan PP Terselatan dan Wetar dengan pusat pelayanan Kota Serwaru.

Pembagian 12 gugus pulau telah disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing wilayah dan potensi daya dukung kawasan serta daya dukung lahan untuk arah pengembangan tiap-tiap sektor untuk menunjang pembanngunan kawasan secara

menyeluruh. Adapaun pembagian berdasarkan potensi pengembangan dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 :
Gugus Pulau Berdasarkan Potensi Pengembangan

No	Gugus Pulau	Fungsi dan Prioritas Pengembangan	Rencana Pengembangan Infrastruktur
1.	Buru	1. Perkebunan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Peternakan 5. Pariwisata 6. Kehutanan.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
2	Seram Barat	1. Pertanian 2. Perkebunan 3. Perikanan 4. Pariwisata 5. Pertambangan 6. Industri.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
3.	Seram Utara	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perikanan 5. Pariwisata	Fasilitas pelayanan publik tingkat kabupaten, pelabuhan regional, jaringan jalan darat.
4.	Seram Timur	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan

		4. Perikanan 5. Pariwisata 6. Pertambangan.	penyeberangan, bandara, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
5.	Seram Selatan	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perikanan 5. Pariwisata.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
6.	Kepulauan Banda dan TNS	1. Perikanan 2. Pariwisata 3. Perkebunan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara.
7.	Ambon dan PP Lease	1. Pertanian 2. Kehutanan 3. Perkebunan 4. Perikanan 5. Pariwisata 6. Pendidikan 7. Pemerintahan. 8. Jasa	Fasilitas pelayanan publik tingkat nasional dan provinsi, pelabuhan nasional dan penyeberangan, bandara pusat penyebaran tersier, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
8.	Kepulauan Kei	1. Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Perkebunan 5. Industri 6. Pariwisata 7. Pendidikan.	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
9.	Kepulauan Aru	1. Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Perkebunan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan

		5. Industri 6. Pertahanan	jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
10.	Kepulauan tanimbar	1. Perikanan 2. Pertanian 3. Kehutanan 4. Perkebunan 5. Industri 6. Pendidikan 7. Pertambangan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan nasional dan penyeberangan, bandara pusat penyebaran tersier, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
11.	Kepulauan Babar	1. Pertambangan 2. Perikanan 3. Peternakan 4. Pariwisata 5. Pertahanan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
12.	Kepulauan PP Terselatan dan Wetar	1. Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertahanan 4. Pertambangan	Fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, bandara, jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.

Sumber : RTRW Provinsi Maluku tahun 2013 -2033

Selain itu juga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan kawasan-kawasan andalan dengan spesifikasi lokasinya masing-masing. Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, telah ditetapkan 5 kawasan andalan di Provinsi Maluku antara lain:

Tabel 11 :
Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Maluku Berdasarkan RTRW Nasional

No.	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan	Sub Sektor Unggulan
1.	Kawasan Seram	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertanian 2. kehutanan 3. perkebunan 4. perikanan 5. pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tanaman pangan 2. bambu, sagu, minyak atsiri, kayu 3. kelapa, pala, cengkeh, kakao, dan coklat 4. perikanan tangkap serta lebih kepada perikanan budidaya air payau 5. wisata bahari dan wisata alam,
2.	Kawasan Kei-Aru-P. Wetar-P.Tanimbar	<ol style="list-style-type: none"> 1. perikanan 2. pertanian 3. kehutanan 4. perkebunan 5. industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. perikanan tangkap 2. tanaman pangan 3. minyak kayu putih dan minyak atsiri 4. kelapa, kakao, dan cengkeh 5. industri pengolahan hasil hutan dan hasil laut
3.	Kawasan Buru	<ol style="list-style-type: none"> 1. perkebunan 2. perikanan 3. pertanian 4. pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkebunan cengkeh dan pala 2. budidaya air payau 3. kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete, kopi, pala dan vanili)

No.	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan	Sub Sektor Unggulan
			4. wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah
4.	Kawasan Andalan Laut Banda dan sekitarnya	1. perikanan 2. pertambangan 3. pariwisata	1. perikanan tangkap 2. Pertambangan Mangan dan nikel 3. wisata sejarah, wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya.
5.	Kawasan Andalan Laut Arafuru dan sekitarnya	1. perikanan laut 2. pertambangan 3. pariwisata	1. perikanan tangkap 2. Pertambangan Minyak bumi di Marsela 3. wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya.

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013 - 2033

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengendalian pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan dilakukan secara terus menerus untuk menjamin keberlanjutan proses pembangunan tersebut dapat terjaga dan terkendali. Untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dapat diketahui dan sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta dapat mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 nomor 10 menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Pembangunan yang berkelanjutan hendaknya mempertimbangan kajian aspek lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Hal ini juga dapat dilaksanakan dengan melakukan penelaahan dokumen KLHS terhadap dokumen Renstra setiap OPD sehingga terciptanya konsistensi dan sinergitas antara dokumen Renstra dengan dokumen KLHS.

Tabel 12:

Telaahan KLHS terhadap Tugas dan Fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Maluku

No	Kebijakan KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Permasalahan dan Isu strategis	Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan	Proses perencanaan pembangunan belum mempedomani hasil KLHS	Belum padunya dokumen rencana OPD dengan dokumen KLHS	Tersedianya regulasi yang mengatur perencanaan yang mempedomani KLHS
2.	Strategi dan Rekomendasi	Memastikan seluruh OPD terkait untuk melaksanakan	Menindaklanjuti hasil kajian lingkungan	Mengintegrasikan dokumen perencanaan	Mempedomani KLHS dalam pelaksanaan

pembangunan untuk dengan perencanaan
sektoral sesuai perencanaan dokumen KLHS pembangunan
dengan daya pembangunan
dukung lingkungan di daerah

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Maluku

Berdasarkan kajian terhadap aspek-aspek diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah yang belum Holistik, Integratif, Terpadu dan Spasial.
2. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur perencana.
3. Belum memadainya sarana prasarana perkantoran pendukung perencanaan.
4. Belum terjaminnya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
5. Belum optimalnya sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
6. Belum optimalnya fungsi kelitbangan dan kerjasama pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan selama kurun waktu tertentu dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan juga menggambarkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dalam rangka untuk menjawab misi yang ditetapkan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang hendak dicapai dalam rentang waktu yang lebih pendek dari pada tujuan.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi Perangkat Daerah. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada visi dan misi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024, maka tujuan pembangunan yang hendak dicapai oleh Bappeda Provinsi Maluku sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencanaan selama kurun waktu lima tahun (2019 - 2024) serta sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tabel 13 :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Pelayanan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Maluku

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun ke-				
				I	II	III	IV	V
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur	1. Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu 2. Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD 3. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD 4. Indeks Daya Saing Daerah 5. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Ya/Tidak 90 % 100 % 0,01 - 3 100 %	Ya/Tidak 95 % 100 % 3,01 - 4 100 %	Ya/Tidak 100 % 100 % 4,01 - 8 100 %	Ya/Tidak 100 % 100 % 8,01-12 100 %	Ya/Tidak 100 % 100 % 8,01-12 100 %
	Meningkatkan Kerjasama	Meningkatkan Kerjasama	1. Tingkat Efektifitas Kerjasama Pemerintah Daerah	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42

Pembangunan
Daerah

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku

Sinergitas antar dokumen untuk mendukung konsistensi perencanaan pembangunan di daerah. Salah satunya adalah keterhubungan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang dimulai dari hubungan antara tujuan dan sasaran antar dokumen perencanaan. Periode perencanaan jangka menengah Provinsi Maluku yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan rujukan bagi Perangkat Daerah untuk mensinergikan proses perencanaan jangka menengah sehingga dapat menjawab visi dan misi Pemerintah Daerah. Hubungan tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda Provinsi Maluku tahun 2019-2024 dapat digambarkan pada tabel 11 berikut:

Tabel 14:

Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda Provinsi Maluku.

RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024		Bappeda Provinsi Maluku	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	- Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	- Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur
- Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	- Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif		- Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk menjawab pencapaian tujuan dan sasaran daerah secara efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta visi dan misi Kepala Daerah yang dijalankan oleh Bappeda Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 :

Hubungan Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Maluku

Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan				
Misi : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	- Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terukur	- Melaksanakan Perencanaan Pembangunan secara Holistik, Integrasi, Terpadu dan Spasial	- Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui	

- Meningkatkan kerjasama pembaangunan daerah
- Meningkatkan Kualitas Aparatur Perencanaan
- Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran Pendukung Perencanaan yang memadai
- Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
- Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Peaporan Pembangunan Daerah Berbasis Sistem Informasi
- Meningkatkan keterpaduan dokumen perencanaan dan fungsi pengendalian monitoring yang efektif dan efisien serta penguatan kelembagaan
- Meningkatkan penerapan sistem informasi daerah (SIDa)
- Meningkatkan kemitraan yang berkualitas dan berkelanjutan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Peningkatan perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa strategi pembangunan yang secara teknis memiliki kemampuan untuk mendorong perbaikan ekonomi daerah yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya untuk menjawab tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan diatas, maka Bappeda Provinsi Maluku menjawabnya dengan penerapan Program dan Kegiatan untuk menjawab pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Program dan kegiatan yang disusun untuk menjawab tujuan dan sasaran dapat digambarkan pada tabel 16 :

Tabel 16 :
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BAPPEDA PROVINSI MALUKU

TAHUN 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Pena nggu ng Jawa b
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Terukur	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan		1.396.200.000		1.399.200.000		1.416.425.000		1.436.886.250		2.122.600.000		7.756.311.250	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.500.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.500.000	12 Bulan	12.500.000	60 Bulan	55.500.000	Bappeda
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi (internet) untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	175.000.000	60 Bulan	855.000.000	Bappeda
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	48 unit	48 unit	60.000.000	53 unit	63.000.000	53 Unit	65.000.000	53 Unit	65.000.000	56 Unit	729.500.000	56 Unit	982.500.000	Bappeda
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 orang	2 orang	120.000.000	2 orang	120.000.000	2 orang	120.000.000	2 orang	130.000.000	2 orang	130.000.000	2 orang	620.000.000	Bappeda

			09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		40 Unit	90.000.000	40 Unit	94.500.000	40 Unit	99.225.000	40 Unit	104.186.250	40 Unit	109.400.000	40 Unit	497.311.250	Bappeda
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		35 Jenis	150.000.000	35 Jenis	150.000.000	35 Jenis	150.000.000	35 Jenis	155.000.000	35 Jenis	155.000.000	35 Jenis	760.000.000	Bappeda
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kerja kantor (buku disposisi, kartu ucapan, kartu nama, kwitansi proyek, RKA, DPA, LKIP, Laporan Keuangan dan Aset dan lainnya)	1.263	10 Jenis	85.000.000	10 Jenis	85.000.000	10 Jenis	85.000.000	10 Jenis	85.000.000	10 Jenis	85.000.000	10 Jenis	425.000.000	Bappeda
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan kantor		120 buah	7.200.000	120 buah	7.200.000	120 buah	7.200.000	120 buah	7.200.000	120 buah	7.200.000	600 buah	36.000.000	Bappeda
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10 jenis	30.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	30.000.000	10 jenis	150.000.000	Bappeda
			16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor (Dispenser)		6 buah	15.000.000	-	-	-	-	-	-	6 buah	15.000.000	12 buah	15.000.000	Bappeda

			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat		1450 Orang	90.000.000	1450 Orang	100.000.000	1450 Orang	100.000.000	1450 Orang	100.000.000	1450 Orang	100.000.000	1450 Orang	490.000.000	Bappeda
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pusat dan daerah		24 Orang	391.200.000	24 Orang	391.200.000	24 Orang	391.200.000	24 Orang	391.200.000	24 Orang	391.200.000	24 Orang	1.956.000.000	Bappeda
	40		19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan sinergitas perencanaan daerah		22 Orang	182.800.000	22 Orang	182.800.000	22 Orang	182.800.000	22 Orang	182.800.000	22 Orang	182.800.000	22 Orang	914.000.000	Bappeda
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.255.000.000		1.283.750.000		1.212.687.500		1.181.850.000		1.558.170.000		7.491.457.500	
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk menunjang kerja kantor	48 unit	5 Unit	840.000.000	-	-	-	-	3 unit	90.000.000	-	-	8 Unit	930.000.000	Bappeda
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	17 unit	5 Unit	125.000.000	-	-	-	-	-	-	5 Unit	152.000.000	10 Unit	277.000.000	Bappeda
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor (Komputer, Infokus)		10 Unit	200.000.000	-	-	5 Unit	125.000.000	-	-	10 Unit	200.000.000	25 Unit	525.000.000	Bappeda

			10	Pengadaan Meubeleur Kantor	Tersedianya meubeleur kantor (Kursi Rapat, Lemari Rak Besi, Kursi/meja)		3 jenis	90.000.000	-	-	-	-	-	3 jenis	90.000.000	3 jenis	180.000.000	Bappeda	
			24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	tersedianya bahan bakar dan suku cadang kendaraan dinas		48 Unit	650.000.000	53 Unit	680.000.000	53 Unit	680.000.000	53 Unit	680.000.000	56 Unit	700.000.000	56 Unit	3.390.000.000	Bappeda
			26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan kantor terawat dengan baik		30 Unit	75.000.000	30 Unit	78.750.000	30 Unit	82.687.500	30 Unit	86.850.000	30 Unit	91.170.000	30 Unit	414.457.500	Bappeda
			44	Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional roda 4 terawat dengan baik	11 unit	11 Unit	275.000.000	13 Unit	325.000.000	13 Unit	325.000.000	13 Unit	325.000.000	13 Unit	325.000.000	13 Unit	1.575.000.000	Bappeda
			45	Pembuatan e-Office	Tersedianya data elektronik perkantoran		-	-	1 unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	200.000.000	Bappeda
		03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				475.000.000	-	-	-	-	-		498.750.000		973.750.000		
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi seluruh aparatur Bappeda		76 pasang	175.000.000	-	-	-	-	-	1 paket	183.750.000	2 paket	358.750.000	Bappeda	
			05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus untuk menunjang agenda Pemerintah Daerah maupun Pusat		76 pasang	150.000.000	-	-	-	-	-	1 paket	157.500.000	2 paket	307.500.000	Bappeda	

			06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga bagi seluruh aparatur		76 pasang	150.000.000	-	-	-	-	-	1 paket	157.500.000	2 paket	307.500.000	Bappeda	
		15		Program Pengembangan Data/informasi				850.000.000		800.000.000		800.000.000			800.000.000		4.050.000.000		
			02	Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Buku Regional Income, Buku IPM, Buku Maluku Dalam angka, dan Buku indikator Kesejahteraan Masyarakat	1 Dok	4 Buku	300.000.000	4 Buku	300.000.000	4 Buku	300.000.000	4 Buku	300.000.000	4 Buku	300.000.000	20 Buku	1.500.000.000	Bappeda
			06	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Maluku	Sistem Informasi Perencanaan berjalan baik mendukung perencanaan pembangunan daerah	1 unit	1 Unit	550.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 unit	2.550.000.000	Bappeda
		16		Program Kerjasama Pembangunan				7.200.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000			6.050.000.000		30.350.000.000	-	
	Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah		04	Koordinasi Kerjasama Provinsi Kepulauan	Terlaksananya koordinasi Provinsi Kepulauan	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	5 laporan	2.250.000.000	Bappeda
			06	Koordinasi Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tersedianya laporan hasil kerjasama dan pengembangan daerah	-	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	5 Laporan	1.250.000.000	Bappeda
			07	Koordinasi dan Asistensi Ahli Pembangunan Daerah	Pendampingan Tenaga ahli Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	5 Laporan	2.500.000.000	Bappeda

			08	Koordinasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan teknologi di Provinsi Maluku	-	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	5 Laporan	1.250.000.000	Bappeda
			09	Penyusunan RAD SDGs Provinsi Maluku 2020 - 2024	Tersedianya Dokumen RAD-SDGs Provinsi Maluku tahun 2020-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	Bappeda
			10	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD SDGs	Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan RAD SDGs	-	1 Dokumen	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	10 Laporan	1.000.000.000	Bappeda
			11	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Analisis Wilayah dan Konektivitas	tersedianya Laporan Koordinasi Program Kelitbangan Daerah di Bidang ekonomi	-	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	5 Laporan	1.250.000.000	Bappeda
			12	Kerjasama Pembangunan Dengan Lembaga Donor dan Dunia Usaha	Tersedianya Laporan Partisipasi Korporasi/Swasta/BUMN/BUMD serta organisasi dalam Forum TSP	-	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	1.750.000.000	Bappeda
			13	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Kerjasama Pemerintah RI - UNICEF Bidang Kesehatan	Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kerjasama Pemerintah RI - UNICEF Bidang Kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	5 Laporan	1.000.000.000	Bappeda
			14	Kajian Tematik	Tersedianya Kajian Tematik dalam mendukung	-	5 Dokumen	3.000.000.000	5 Dokumen	3.000.000.000	5 Dokumen	3.000.000.000	5 Dokumen	3.000.000.000	5 Dokumen	3.000.000.000	25 Dokumen	15.000.000.000	Bappeda

				Pembangunan Daerah															
		15	Koordinasi Penelitian Sosial Pemerintahan	Tersedianya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah di provinsi Maluku	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	1.250.000.000	Bappeda	
		16	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Lahan Secara Berkelanjutan		-	1 Dokumen	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750.000.000	Bappeda	
		17	Perencanaan Museum Rempah dan Plasma Nutfah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan museum rempah dan plasma nutfah		1 Dokumen	750.000.000									1 Dokumen	750.000.000	Bappeda	
		17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.250.000.000		
		07	Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku	5 kab/kota	5 kab/kota	250.000.000	5 kab/kota	250.000.000	5 kab/kota	250.000.000	5 kab/kota	250.000.000	5 kab/kota	250.000.000	5 Kab/Kota	1.250.000.000	Bappeda	
		19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		1.600.000.000		

			05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pusat-Pusat Industri dan Perdagangan	Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Industri dan Perdagangan di 11 Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	325.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	375.000.000	5 Laporan	1.600.000.000	Bappeda
		20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				625.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.750.000.000	
			01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Tersedianya Aparatur Perencanaan yang handal	26 Orang	26 Orang	400.000.000	26 Orang	400.000.000	28 Orang	400.000.000	28 Orang	400.000.000	30 Orang	400.000.000	138 Orang	2.000.000.000	Bappeda
			04	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tersedianya Laporan SPIP	1 Dokumen	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	5 Dokumen	750.000.000	Bappeda
			06	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja	Terselenggaranya koordinasi teknis peningkatan kualitas laporan kinerja triwulan Badan	-	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 dokumen	375.000.000	Bappeda
		21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				7.450.000.000		7.450.000.000		7.225.000.000		8.050.000.000		9.375.000.000		39.550.000.000	
			08	Penyusunan RKPD, RKPD Perubahan dan KUA-PPAS	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan RKPD, RKPD Perubahan dan KUA-PPAS	2 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	10 Dokumen	1.800.000.000	Bappeda

			09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Rakortekrenbang dan Musrenbang RKPD	1 Dokumen	2 Laporan	1.500.000.000	2 Laporan	1.350.000.000	2 Laporan	1.350.000.000	2 Laporan	1.350.000.000	2 Laporan	1.350.000.000	10 Laporan	6.900.000.000	Bappeda
			12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	1.250.000.000	Bappeda
			13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan Monitoring pelaksanaan Program Perencanaan pembangunan Daerah	3 Dokumen	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	5 Laporan	5.000.000.000	Bappeda
			14	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (AD-PK) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Terwujudnya Komitmen Aparatur Pemerintah Daerah dalam Meminimalisir tindakan Pencegahan Korupsi	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	1.000.000.000	Bappeda
			15	Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersedianya Laporan usulan kegiatan DAK Provinsi Maluku	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	5 Laporan	1.250.000.000	Bappeda
			23	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku	Tersedianya Laporan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Maluku	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	1 Laporan	2.500.000.000	5 Laporan	12.000.000.000	Bappeda

			24	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Maluku Tahun 2020-2024	Tersedianya dokumen SPKD sebagai pedoman pengentasan kemiskinan di daerah	-	1 Dokumen	600.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	600.000.000	Bappeda
			25	Rapat Kerja Gubernur Maluku	Terlaksananya Rapat Kerja Gubernur Maluku untuk meningkatkan pembangunan daerah		3 Lokasi	1.250.000.000	3 Lokasi	1.250.000.000	3 Lokasi	1.250.000.000	3 Lokasi	1.250.000.000	11 Kab/Kota	6.250.000.000	Bappeda
			26	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (2020-2024)	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Bappeda
			27	Review RPJMD Provinsi Maluku	Tersedianya laporan review Pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024	-	-	-	1 laporan	300.000.000	-	-	-	-	1 Laporan	300.000.000	Bappeda
			28	Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	Bappeda
			29	Review Renstra Bappeda Tahun 2019-2024	Terlaksananya review atas dokumen Renstra Bappeda	-	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	Bappeda
			30	Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	1.500.000.000	Bappeda

			31	Penyusunan RPJMD Teknokratik Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Tekhnokratik Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	900.000.000	-	-	1 Dokumen	900.000.000	Bappeda	
			32	Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029	Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan Pernagkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	Bappeda	
		22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				1.700.000.000	4.400.000.000	3.750.000.000	4.050.000.000		3.750.000.000		17.650.000.000				
			09	Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata di 11 Kabupaten/kot a	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	5 Laporan	1.450.000.000	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM	tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM				1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	4 laporan	3.000.000.000	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan lingkungan hidup, Energi Sumberdaya Mineral, kebencanaan dan kehutanan	tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup, Energi Sumberdaya Mineral, kebencanaan dan kehutanan				1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	1 laporan	750.000.000	4 laporan	3.000.000.000	Bappeda

				Koordinasi Perencanaan Pembangunan pertanian, kelautan perikanan dan ketahanan pangan	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi pertanian, kelautan perikanan dan ketahanan pangan				1 lapora n	750.000.000	1 lapora n	750.000.000	1 lapor an	750.000.000	1 lapor an	750.00 0.000	4 lapor an	3.000.00 0.000	Bapp eda
			10	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian	Tersedianya laporan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang pertanian	-		1 Lapora n	275.000.000	1 Lapor an	300.000.000	1 Lapor an	300.000.000	1 Lapor an	300.00 0.000	5 Lapor an	1.475.00 0.000	Bapp eda	
			11	Evaluasi dan Monitoring RAD Pangan dan Gizi	Tersedianya laporan Evaluasi dan Monitoring RAD Pangan dan Gizi	-		1 Lapora n	300.000.000	1 Lapor an	300.000.000	1 Lapor an	300.000.000	1 Lapor an	300.00 0.000	5 Lapor an	1.500.00 0.000	Bapp eda	
			12	Koordinasi Peningkatan Ekonomi, Iklim Investasi, Dunia Usaha, Koperasi dan UMKM	Tersedianya Laporan peningkatan Ekonomi, Iklim investasi dan Dunia usaha, Kooperasi dan UMKM di 11 Kabupaten/Kot a	1 Laporan		1 Lapora n	300.000.000	1 Lapor an	250.000.000	1 Lapor an	300.000.000	1 Lapor an	300.00 0.000	5 Lapor an	1.450.00 0.000	Bapp eda	
			13	Penyusunan ICOR Provinsi Maluku Tahun 2020	Tersedianya data ICOR Provinsi Maluku	-		1 Dokum en	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Doku men	300.000. 000	Bapp eda	
			14	Penyusunan Analisis Pengelolaan Kawasan Perikanan Terpadu	Tersedianya Laporan Penyusunan Analisis Pengelolaan Kawasan Perikanan Terpadu	-		-	-	1 Lapor an	400.000.000	-	-	-	-	1 Lapor an	400.000. 000	Bapp eda	

			15	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya laporan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	5 Laporan	1.475.000.000	Bappeda
			16	Evaluasi dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Secara Berkelanjutan	Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Secara Berkelanjutan	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	2 Dokumen	600.000.000	Bappeda

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Indikator kinerja juga memberikan penjelasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Indikator kinerja Bappeda Provinsi Maluku yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku adalah indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja Bappeda lima tahun kedepan untuk

menjawab Visi dan Misi Kepala Daerah. Indikator kinerja Bappeda Provinsi Maluku digambarkan pada tabel 15 berikut:

Tabel 15 :

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Maluku yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Dokumen RPJMD, RKPD, RKPD-P yang tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Persentase kesesuaian program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Indeks Daya Saing Daerah	0,01 - 3	0,01 - 3	3,01 - 4	4,01 - 8	8,01 - 12	8,01 - 12	8,01 - 12
5.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Tingkat Efektivitas Kerjasama Pemerintah Daerah	72,50	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan bidang perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Bappeda yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Disamping itu juga, Renstra merupakan alat untuk mengukur kinerja Bappeda dalam pencapaian kinerja yang direpresentasikan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan dan lima tahun kedepan.

Renstra Bappeda Provinsi Maluku disusun juga sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga, Renstra dapat berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dipertanggungjawabkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Renstra Bappeda Provinsi Maluku dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Kepala Bappeda Provinsi Maluku bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Renstra baik dampak

- (*impact*), keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*) yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 2) Renstra Bappeda merupakan pedoman penyusunan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang kemudian direalisasikan dalam DPA Bappeda Provinsi Maluku.
 - 3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja di dalam Renstra dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel secara tertulis oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku kepada Gubernur Maluku dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya.

Ambon, Januari 2020

Pt. Kepala Bappeda Provinsi Maluku



Basimuddin Salampessy, S.Pi, M.Si
Pembinaan Tk. I

NIP. 09710212 199803 1 012